

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang UMKM

2.1.1. Definisi UMKM

Pada dasarnya terdapat beberapa definisi yang diperoleh dari beberapa instansi yang berbeda untuk memberikan definisi terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut adalah definisi mengenai UMKM tersebut:

- Definisi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.”

- Definisi menurut Kementerian Koperasi dan UMKM:

“Usaha Kecil (UK) termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.00; Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha Milik Warga Negara Indonesia

yang memiliki kekayaan yang lebih besar dari Rp.200.000.000; s.d Rp.10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan.”

➤ Definisi tentang UMKM menurut Bank Indonesia:

“Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang atau perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000; per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria asset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.200.000.000 s.d Rp.5.000.000.000) dan non-manufaktur (Rp.200.000.000 s.d Rp.600.000.000).”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang digerakan oleh orang perorangan, atau badan usaha namun dengan modal usaha tertentu dan keterbatasannya dalam mengembangkan usaha, serta bukan anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan atau koperasi.

2.1.2. Jenis-Jenis Atau Klasifikasi UMKM

Dengan banyaknya definisi yang menjelaskan tentang pengertian UMKM maka menimbulkan banyaknya perbedaan Persepsi dalam hal mengelompokan atau penggolongan UMKM. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sebagai dasar untuk penggolongan UMKM tersebut berdasarkan kriteria yang ada sebagai berikut:

- Kriteria dan ciri-ciri Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20

Tahun 2008 :

“Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang. Ciri-ciri usaha mikro diantaranya sebagai berikut; jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa usaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.”

- Kriteria dan ciri-ciri Usaha Kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun

2008 :

“Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta). Memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang. Ciri-ciri usaha kecil diantaranya sebagai berikut; jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha; sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha; sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.”

- Kriteria dan ciri-ciri Usaha Menengah menurut Undang-Undang No. 20

Tahun 2008 :

“Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupaiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut; pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern,dengan pembagian tugas antara lain; bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan; Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsotek, pemeliharaan kesehatan dll; sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; dan sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.”

2.1.3. Kondisi dan Potensi Perkembangan UMKM

Melihat sejarah perkembangan serta ketangguhan sektor UMKM dalam menghadapi berbagai krisis keuangan yang pernah melanda Indonesia maupun global. Pantas rasanya jika UMKM sering disebut sebagai sektor usaha yang tangguh dan berperan bagi perekonomian Indonesia.

Potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha yang semakin kompetitif sehingga produk juga harus diperkuat (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2013). Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit sebagai

suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh pihak perbankan.

Basri dan Nograho (2009) menyebutkan bahwa pada dasarnya kondisi UMKM saat ini sedang menghadapi 3 kategori permasalahan yang sering kali mendera UMKM yaitu:

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar (*Basic Problems*) yaitu permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia, pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan (*Advance Problems*) yang berupa pengenalan dan penetrasi pasar ekspor belum optimal, keterbatasan pengetahuan terkait prosedur kontrak penjualan serta peraturan dinegara tujuan ekspor.
3. Permasalahan antara (*Intermediate Problems*) yakni permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan lain tersebut antara lain manajemen keuangan, pengajuan kredit, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM sedikit banyak mempengaruhi potensi pengembangan usaha mereka kedepan. Pada dasarnya UMKM Indonesia memiliki potensi untuk berkembang yang sangat besar yakni dengan mulai berlakunya perdagangan bebas antar Negara asia tenggara dengan cina (ACFTA) dan wacana tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang seharusnya dipandang sebagai suatu potensi untuk mengembangkan

ekspor UMKM Indonesia di Negara lain, jika UMKM yang ada di Indonesia sudah siap dan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dapat melindungi dan mendukung UMKM. Selain itu semakin banyaknya kehadiran pasar swalayan dan supermarket swalayan dibanyak daerah membuka kesempatan kerja juga bagi UMKM untuk mengakses pasar baru. Kemudian dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang semakin peduli dengan perkembangan UMKM, saat ini banyak lembaga-lembaga nirlaba yang bersedia mewadahi dan membantu UMKM untuk dapat mengatasi permasalahan usaha mereka. Sehingga dengan potensi pengembangan usaha yang dimiliki tersebut diharapkan UMKM dapat semakin meningkat peran dan kontribusinya bagi perekonomian Indonesia seperti dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto dan penurunan angka tingkat pengangguran.

2.1.4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

2.1.4.1 Kekuatan UMKM

1. Penyediaan lapangan kerja, peran usaha mikro kecil dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru, dan memanfaatkan sumber daya alam sekitar.
3. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
4. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

5. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis.

2.1.4.2 Kelemahan UMKM

1. Kesulitan pemasaran

Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UMKM di Kota Pontianak adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UMKM di Kota Pontianak menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM di Kota Pontianak, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kontrol kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UMKM di Kota Pontianak.

5. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UMKM umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UMKM di Kota Pontianak untuk dapat bersaing di pasar global.

2.2 Akuntansi

2.2.1 Pengertian & Fungsi Akuntansi

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi

3. Pengertian akuntansi menurut Mulyadi (2001) adalah sebagai berikut :

“Proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan”

4. Pengertian akuntansi menurut America Accounting Association dalam Soemarso (2004) adalah sebagai berikut :

“proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi mengandung 2 pengertian, yakni :

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Laporan tersebut berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut, baik pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pihak dalam perusahaan yaitu manajemen, pihak luar perusahaan yaitu Investor, Kreditor, Pemasok, Pemerintah, LSM dan lain-lain.

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

2.2.1.2 Fungsi Akuntansi

a) Akuntansi Sebagai Suatu Proses

Pada tahun 1912, system akuntansi semakin berkembang menjadi suatu yang penting, hal ini karena ditahun tersebut adanya penerapan konstitusi dengan ke-13 pasala yang memberikan wewenang negara untuk memungut pajak pendapatan. Sebuah persoalan yang cukup serius muncul sehingga keperluan akuntansi semakin meningkat. Karena aktivitas perusahaan selalu berubah, maka prosedur akuntansi disusun tanpa adanya perdebatan dan diskusi secara luas (Soemarso, 2004).

Sehingga pada saat itu akuntansi dikatakan sebagai suatu proses karena para akuntan menyusun dan mengembangkan metode guna memenuhi kebutuhan masing2 perussahaan dengan memberikan dan menghasilkan prosedur berbeda antar perusahaan walaupun mempunyai aktivitas sama.

b) Akuntansi sebagai Suatu Informasi

Pada tahun 1966 *American Accounting Association* (AAA) dalam Soemarso (2004), mendefinisikan akuntansi sebagai “Sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas/operasi/peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi.”

c) Kegunaan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu lembaga/badan usaha kepada pihak yang berkepentingan, baik didalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak diluar perusahaan (soemarso, 2004).

Laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang berupa angka-angka suatu uang yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, yang berguna untuk :

i. Perencanaan

Melalui informasi ekonomi yang tepat maka manajemen perusahaan dapat menyusun rencana baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

ii. Pengendalian

Melalui informasi ekonomi yang akurat maka manajemen perusahaan dapat mengontrol, menilai terhadap jalannya perusahaan.

iii. Pertanggungjawaban

Walaupun laporan keuangan bersifat kuantitatif, tetapi juga dapat dipergunakan untuk menelusuri data kuantitatif (misal jumlah karyawan) sehingga dapat dipergunakan untuk bahan pertanggungjawaban manajemen akan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

2.2.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Seperti halnya bidang-bidang kegiatan lain, akuntansi juga mempunyai bidang-bidang khusus sebagai akibat dari perkembangan zaman. Kecenderungan ini disebabkan oleh perkembangan perusahaan, timbulnya sistem perpajakan baru dan bertambahnya pengaturan-pengaturan oleh pemerintah terhadap kegiatan perusahaan. Faktor-faktor tersebut bersama-sama dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat telah mengharuskan akuntan untuk memperoleh keahlian yang tinggi dalam spesialisasi tertentu.

Berikut ini bidang-bidang khusus akuntansi menurut Soemarso (2004) sebagai akibat dari perkembangan zaman, yaitu :

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi serta secara keseluruhan Ia berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak luar perusahaan. Untuk penyusunan laporan keuangan sebelumnya harus disepakati/disetujui bersama. Oleh karena pihak-pihak diluar perusahaan yang mempunyai kepentingan banyak macam ragamnya, maka laporan yang dihasilkan bersifat serba guna (*general Purpose*).

2. Auditing (*Auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Walaupun tujuan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya. Namun terdapat tujuan-tujuan lain. Misalnya, memastikan terhadap kebijakan, prosedur atau peraturan serta menilai efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan tertentu. Konsep yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa. Konsep lain yang dianut adalah kerahasiaan serta pengumpulan bukti-bukti yang cukup dan relevan. Pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan yang cukup dan relevan tadi dilakukan melalui pengujian terhadap catatan-catatan akuntansi dan prosedur pemeriksaan lainnya.

3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang memberikan informasi baik keuangan (kuantitatif) maupun bukan keuangan (kuantitatif) untuk kepentingan manajemen perusahaan. Bidang ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan. Titik sentral dalam akuntansi manajemen adalah informasi untuk manajemen suatu perusahaan. Fungsi akuntansi ini adalah mengendalikan kegiatan perusahaan tertentu, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam mengambil suatu keputusan ekonomi.

4. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Bidang ini menekankan pada penetapan dan control atas suatu biaya. Terutama yang berhubungan dengan suatu biaya produksi barang, tetapi perhatian yang mulai meningkat mulai diberikan atas biaya distribusi. Bahkan akuntansi ini telah mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Fungsi utamanya mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen sebagai alat kontrol atas kegiatan yang telah dilakukan dan bermanfaat untuk membuat rencana untuk masa mendatang.

5. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Tujuan laporan akuntansi yang digunakan perpajakan berbeda dengan tujuan akuntansi yang lain. Hal ini disebabkan oleh bedanya konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan, metode pengukuran dan tatacara

pelaporan. Semua ini diatur oleh pengatur pajak. Karena setiap perusahaan akan berurusan dengan pajak, maka perlu sekali mempunyai akuntan perpajakan.

6. Sistem Informasi (*Information System*)

Bidang ini menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi secara efektif. Melalui sistem ini diproses informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan kepada pemegang saham, kreditur, badan-badan pemerintah, pemimpin perusahaan, pegawai, dan lain-lain. Sistem yang dirancang dengan baik akan memungkinkan pimpinan perusahaan mengidentifikasi masalah dan menelaahnya sehingga masalah dapat ditangani.

7. Penganggaran (*Budgeting*)

Bidang ini berhubungan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa datang serta analisis dan pengontrolannya. Anggaran adalah saran untuk menjabarkan tujuan suatu perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimasa datang serta nilai uang yang terlibat didalamnya.

8. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)

Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintah. Ia menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dan administrasi keuangan Negara. Disamping itu, bidang ini mencakup pengendalian atas pengeluaran

melalui anggaran Negara. Termasuk didalamnya adalah kesesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.2.3 Laporan Keuangan UMKM Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pengertian laporan keuangan ialah laporan keuangan yang sangat dibutuhkan bagi dunia bisnis dan ekonomi, khususnya dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi. Dalam proses akuntansi diidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mampu memberi gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Sejalan dengan keinginan untuk mencapai adanya suatu bentuk yang sama dalam hal akuntansi pencatatan dan pelaporan, *International Accounting Standard Board* (IASB) menyusun suatu acuan standar akuntansi keuangan internasional yang disebut sebagai *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Dengan demikian, diharapkan standar akuntansi pencatatan dan pelaporan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan disesuaikan dengan standar tersebut sehingga kinerja perusahaan antar negara dapat diperbandingkan dalam kerangka standar yang sama.

Memperhatikan banyaknya entitas usaha dengan skala mikro kecil dan menengah, maka IASB menerbitkan acuan standar akuntansi pencatatan dan pelaporan bagi entitas skala tersebut, yang disebut dengan *IFRS for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs)*. *IFRS for SMEs* merupakan modifikasi dan simplifikasi dari IFRS pokok yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan adanya standar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sederhana dan tidak banyak membebani pengguna. Terminologi SME yang dipergunakan oleh IASB diartikan sebagai "Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan bagi pengguna eksternal serta tidak memiliki akuntabilitas publik". Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, definisi ini mengacu pada entitas usaha privat (*private entities*). Atas dasar definisi tersebut dan praktek di lapangan, maka penyebutan *IFRS for SMEs* diubah menjadi *IFRS for Private Entities*.

Sejalan dengan tujuan IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pencatatan dan pelaporan Indonesia dengan standar internasional, pada tanggal 16 Desember 2008 telah dilansir *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan adopsi dari *IFRS for SMEs* dengan beberapa modifikasi yang diperlukan. Definisi yang dipergunakan oleh IASB mengenai UMKM, praktek/definisi yang dipergunakan di negara lain, perubahan terminologi yang dilakukan oleh IASB, serta kondisi nyata entitas UMKM di Indonesia, ED SAK UKM diubah dan diformalkan menjadi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009.

Dalam SAK ETAP telah dilakukan modifikasi dan simplifikasi atas ED SAK UKM sehingga diharapkan akan lebih mudah dilaksanakan oleh entitas UMKM di Indonesia.

Definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Suatu entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SAK ini dapat digunakan untuk seluruh entitas usaha yang tidak *go public*, tidak mengerahkan dana dari masyarakat serta laporan keuangan yang dihasilkan ditujukan untuk pengguna eksternal.

Sesuai SAK ETAP, laporan keuangan entitas lengkap meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (Laporan Perubahan Modal)
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Peranan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No. 1 Paragraf 5 menyatakan :

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (Stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya yang akan dipercayakan kepada mereka.”

Sedangkan APB Statement No. 4 (AICPA) yang dikutip oleh Harahap, (2007) membagi tujuan laporan keuangan menjadi 2 yaitu :

1) Tujuan Umum

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.

2) Tujuan Khusus

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi lainnya yang relevan.

Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakikatnya adalah sama, yaitu memberikan informasi mengenai keadaan finansial perusahaan kepada pihak luar perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pengambil keputusan.

2.3 Pengertian dan Pengukuran Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Untuk memahami pengertian kinerja keuangan, tentu dengan memahami terlebih dahulu apa itu kinerja. Istilah kinerja kerap dihubungkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sukhemi,2007:23). Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek

keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya (Jumingan, 2006:239). Karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya maka kinerja menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan.

pengertian kinerja keuangan menurut para ahli :

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, *likuiditas*, dan *profitabilitas* (Jumingan, 2006). Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Menurut Sucipto (2003), pengertian kinerja keuangan yakni penentuan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Mulyadi (2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan

sebelumnya”.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2005:1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

2.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti yang penting bagi pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha perusahaan.

Menurut Mahmud dan Halim, (2003, 75) ukuran kinerja meliputi rasio-rasio berikut :

- a. *Rasio Likuiditas* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
- b. *Rasio Aktivitas* mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.

- c. *Rasio Solvabilitas* mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
- d. *Rasio Profitabilitas* mengukur seberapa kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitabilitas).
- e. Rasio Pasar mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai pasar.

Rasio Keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk memprediksi laba bersih dan dividen pada masa yang akan datang. Cara yang digunakan untuk mendukung prediksi tersebut adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis tersebut mengkombinasikan hubungan antara komponen keuangan yang satu dengan komponen keuangan yang lain. Pada umumnya, hubungan tersebut dilihat dari rasio antara komponen-komponen keuangan yang satu dengan yang lain. Dalam konteks manajemen keuangan, analisis tersebut dikenal dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio ini berguna untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau membandingkan kinerja satu perusahaan pada tahun ini dengan tahun yang lainnya.

Pada dasarnya analisis rasio keuangan dikelompokkan ke dalam empat macam kategori, yaitu (Hanafi; 2003: 77-88):

a. *Rasio Likuiditas*

Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang

dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Biasanya rasio yang digunakan adalah *current ratio*, *cash ratio*, dan *net working capital to total asset ratio*.

b. *Rasio Leverage (Solvabilitas)*

Rasio ini untuk digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio Leverage yang biasanya digunakan seperti *debt to total asset ratio*, *total debt to total capital asset ratio*, *total debt to equity ratio*, *long term debt to equity ratio*, dan lain-lain.

c. *Rasio Aktivitas*

Rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Beberapa rasio yang digunakan misalnya: *total asset turn over ratio*, *receivable turn over ratio*, *inventory turn over ratio*, dan sebagainya.

d. *Rasio Keuntungan (Profitabilitas)*

Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu pada periode tertentu. Beberapa rasio yang sering digunakan adalah *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on total asset (ROA)*, dan sebagainya (Sadarachman diambil dari Hanafi; 1995: 262).

Analisis rasio keuangan tidak hanya berguna bagi kepentingan intern dan ekstern perusahaan. Bagi para bankir berguna untuk mempertimbangkan pemberian kredit jangka pendek maupun kredit jangka panjang kepada perusahaan, untuk itu para bankir lebih tertarik pada rencana jangka pendek, likuiditas, kemampuan memperoleh laba, tingkat efisiensi operasional dan solvabilitas. Bagi para kreditur jangka panjang lebih tertarik pada kemampuan laba dan tingkat efisiensi operasional. Sedangkan bagi para penanam modal lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba jangka panjang dan tingkat efisiensi perusahaan. Bagi manajer keuangan tentu saja sangat berkepentingan dengan semua aspek rasio keuangan, karena harus mampu membayar hutang jangka pendek, mampu membayar hutang jangka panjang, mampu meningkatkan efisiensi perusahaan, mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan mampu memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai likuiditas, profitabilitas, timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi banyak pihak-pihak yang berkepentingan. Harapan tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Dalam laporan keuangan, angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu diperlukan pembandingan yang bisa dipakai untuk melihat

baik tidaknya angka yang dicapai oleh perusahaan, oleh karena itu diperlukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Rata-rata industri bisa dan biasa digunakan sebagai pembanding. Meskipun rata-rata industri ini bukan merupakan pembanding yang paling tepat karena beberapa hal, misalnya karena perbedaan karakteristik rata-rata perusahaan dalam industri dengan perusahaan tersebut. Tetapi rata-rata industri tetap bisa dipakai untuk perbandingan (Hanafi; 2003:70).

2.4 Kerangka pemikiran

Perkembangan ekonomi baik secara nasional maupun regional tidak dapat terlepas dari peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai Negara termasuk di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga/rumahan. Dengan demikian, konsumennya pun berasal dari kalangan menengah kebawah. Selain itu, peranan UMKM terutama sejak krisis moneter 1998 yang di pandang sebagai katup penyelamat dalam pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Pada saat ini sektor UMKM mulai tumbuh dan berkembang, apalagi dengan adanya program pemerintah yang ingin melahirkan kewirausahaan-kewirausahaan membuat semakin banyaknya UMKM yang berdiri dan berkembang. Ditengah banyaknya UMKM yang tumbuh dan berdiri tersebut

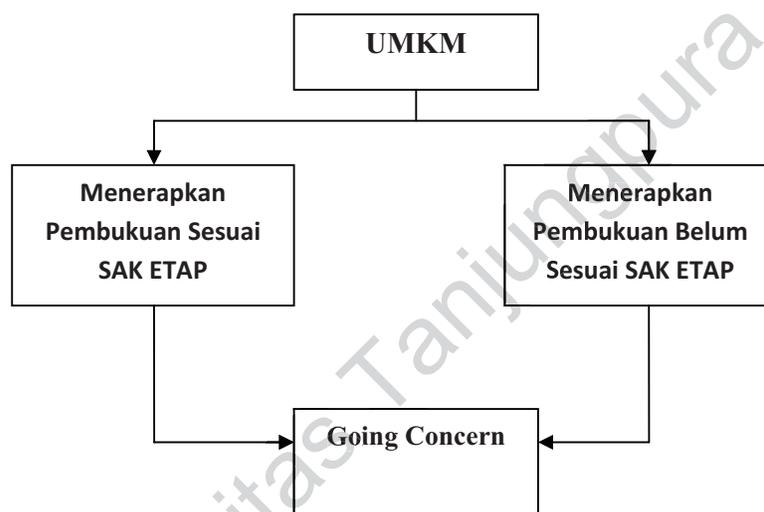
terdapat salah satu kekurangan yang mungkin bukan hal yang tidak asing lagi. UMKM biasanya memiliki kendala dalam hal permodalan, mereka yang ingin mengembangkan usahanya cenderung bermasalah dalam pengadaan modal tersebut. Sekarang ini banyak pihak perbankan maupun pihak pemerintah mengadakan program permodalan bagi UMKM, tetapi pihak perbankan maupun pihak pemerintah tidak mau dengan mudah mengucurkan dana tersebut. Biasanya pihak kreditor tersebut ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi UMKM yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Tetapi dari kondisi sekangan ini UMKM cenderung tidak dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut, karena mereka tidak mengerti praktek penggunaan akuntansi yang bisa menghasilkan laporan keuangan tersebut.

Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha UMKM dinilai masih kurang dipahami oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum menerapkan akuntansi dengan baik. Bahkan ada juga yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha UMKM biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui sehingga pengajuan kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh..

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi. Beberapa tersebut diantaranya adalah jenjang pendidikan, ukuran perusahaan, lama usaha, dan omset usaha. Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan akuntansi diperlukan suatu kerangka pemikiran.

Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang di susun sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran



2.4.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan akuntansi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang di gunakan oleh penulis sebagai rujukan.

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Ira Asih wulandari (2012), melakukan peneliatian tentang Analisis Going Concern Pada Koperasi Praja Tulada Surabaya. Hasil penelitian Koperasi Praja Tulada dapat berkembang dan maju dengan melakukan sosialisasi keberadaan koperasi, pendekatan dan pembinaan untungnya menjadi anggota koperasi.

Evi Emilia Wati (2011), melakukan penelitian tentang Persepsi Para Pelaku UKM (Usaha Kecil, dan Menengah) Terhadap Penerapan Akuntansi, di

Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan manajer/pemilik, skala usaha berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pada UKM di Surabaya. Masa memimpin, lama usaha dan umur perusahaan tidak berpengaruh dalam penerapan akuntansi di Surabaya.

Rudiantoro (2010), melakukan penelitian tentang Analisis Kualitas Laporan Keuangan, Besaran Kredit, Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Usaha, Jenjang Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan Berpengaruh terhadap secara signifikan terkait persepsi pengusaha terkait pentingnya Laporan Keuangan.

Muniarti (2002) melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah menemukan bahwa masa memimpin perusahaan, pendidikan manajer/pemilik pelatihan akuntansi, umur perusahaan dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

2.5 Hipotesis

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Menurut Mundilarso (tanpa tahun dan halaman) mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan

berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi/orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data/informasi yang dikumpulkan melalui sampel.

Menurut Kerlinger (1973) mengatakan hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis, yakni:

- Ho : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara UMKM yang menerapkan pembukuan/akuntansi sesuai SAK ETAP dan yang belum menerapkan SAK ETAP di kota Pontianak.
- Ha : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara UMKM yang menerapkan pembukuan/akuntansi sesuai SAK ETAP dan yang belum menerapkan SAK ETAP di kota Pontianak.